



Bismillahirrahmanirrahim

**AKAD ANGGOTA
KOPERASI SYARIAH SETIA AMANAH SEJAHTERA**

No :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Masehi (... - ... - M)
bertepatan dengan tanggal bulan tahun Hijriyah ((... - ... - H)
bertempat di Kantor Koperasi Syariah Setia Amanah Sejahtera yang bertandatangan dibawah ini

Nama & Badge : #
Jabatan : Pengurus Koperasi Syariah Setia Amanah Sejahtera
Jenis kelamin : L / P
Tempat/ Tanggal lahir : / - - M

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Syariah Setia Amanah Sejahtera yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama & Badge : #
Lokasi/Distrik :
Department :
Jenis kelamin : L / P
Tempat/ Tanggal Lahir : / - - M
Alamat :
Nomor KTP :
Nama Ibu Kandung :
No.TLP : HP :
NPWP :
Email :

Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, bahwa:

- Para Pihak masing-masing memiliki kecakapan dan kewenangan untuk membuat Akad.
- Akad Musyarakah ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang tercakup dalam Koperasi.
- Pihak Kedua selanjutnya mewakilkan Pengawas untuk memberikan kuasa kepada Pengurus.

Para Pihak setuju, sepakat dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan Akad keanggotaan Koperasi Karyawan Minyak Caltex unit Syariah selanjutnya disebut Akad, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

1. Akad Anggota adalah akad Musyarakah



2. Akad Musyarakah (disebut juga dengan Syirkah) adalah kesepakatan para pihak untuk menggabungkan harta mereka atau perbuatan atau tanggungan kewajiban, dengan tujuan mendapatkan Keuntungan.
3. Aset Syirkah adalah sesuatu atas nama Koperasi unit Syariah yang memiliki harga dan dapat dinilai dalam bentuk uang Rupiah oleh penilai independen termasuk perubahan pertambahan selama menjadi anggota koperasi.
4. Modal Harta adalah berupa uang yang disetorkan dalam bentuk iuran Pokok. Dalam proses berjalan bisa bertambah karena keuntungan, iuran Mudhorobah Tetap, Tabungan Mudhorobah Muthlaqah dan Tabungan Mudhorobah Muqoyadah.
5. Kerugian adalah selisih negatif total akumulasi semua harta dibanding total Modal Harta dalam satu periode Syirkah.
6. Keuntungan adalah selisih positif total akumulasi semua harta dibanding total Modal Harta dalam satu periode Syirkah.
7. Manajemen Syirkah adalah kegiatan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan karyawannya.
8. Nisbah adalah pembagian Kerugian atau Keuntungan yang disebut SHU.
9. Pengawas adalah seorang atau beberapa orang yang menjadi wakil seluruh anggota.
10. Pengurus adalah seorang atau beberapa yang diberi tugas oleh pengawas dalam menjalankan usaha.
11. Pihak Ketiga adalah pihak lain diluar Para Pihak, dimana tanggung jawab Pihak Ketiga akan disebutkan sesuai peruntukannya.
12. RAT adalah rapat anggota tahunan yang digunakan untuk memilih pengawas dan pengurus serta hal-hal lain yang menyangkut keputusan seluruh anggota.

Pasal 2 PELAKSANAAN AKAD

Pelaksanaan Akad antara Pihak Para Pihak mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pihak ke-2 (dua)/calon anggota mengisi formulir.
2. Pihak ke-2 (dua)/calon anggota mengajukan verifikasi kepada koperasi umum untuk mendapat rekomendasi bisa menjadi anggota koperasi unit syariah.
3. Pihak ke-2 (dua) menyetorkan iuran pokok.
4. Para Pihak melaksanakan Akad.
5. Pihak Pertama melaksanakan kegiatan koperasi yang diatur oleh ketentuan koperasi syariah termasuk pelaporan perkembangan koperasi, pembagian rugi/laba dan sebagainya.
6. Pengawas adalah wakil dari seluruh anggota dalam hal keputusan dan persetujuan telah mewakili anggota sirkah termasuk Pihak Kedua.

Pasal 3 LINGKUP AKAD

Pihak Pertama berlaku sebagai wakil anggota syirkah saat ini dan sekaligus sebagai Manajemen Syirkah, Pihak Kedua selanjutnya diwakili oleh Pengawas.

Pasal 4 JANGKA WAKTU AKAD

Jangka waktu akad ini adalah selama Pihak Kedua masih/tetap menjadi anggota Pihak Pertama.



Pasal 5 OBJEK AKAD

Objek akad yang dimaksud dalam Akad ini adalah menjalankan segala kegiatan Usaha Syariah yang di ijinan di jalankan sebagaimana umumnya Koperasi di Negara Indonesia.

Pasal 6 KAS KOPERASI

Kas Koperasi adalah tempat rekening untuk menampung uang/harta anggota syirkah yang dilaporkan kepada anggota syirkah secara berkala.

Pasal 7 PENYERTAAN MODAL

Penyertaan Modal Harta dalam Akad ini diterangkan sebagai berikut :

1. Iuran Pokok yang nominalnya sama untuk setiap anggota syirkah, disetorkan pertama kali dan bisa ditambah sesuai dengan perjalanan koperasi.
2. Iuran Mudhorobah Tetap di setor secara rutin dengan nominal sama setiap anggota syirkah dan diakui sebagai modal setelah uang masuk ke Kas Koperasi.
3. Tabungan Mudhorobah Muqoyadah dan Mudhorobah Mutlaqah yang disetor sesuai keinginan Pihak Kedua.

Pasal 8 KEWAJIBAN & HAK

1. Semua Anggota Koperasi secara bersama-sama bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan Koperasi.
2. Semua Anggota Koperasi berkewajiban menanggung kerugian sebagaimana tertuang dalam formulir bagi rugi yang diatur dalam SOP keanggotaan.
3. Semua Anggota Koperasi berhak atas kepemilikan Aset Syirkah sebesar porsi Modal Harta.
4. Semua Anggota Koperasi berhak atas keuntungan sebagaimana tertuang dalam formulir bagi hasil yang diatur dalam SOP keanggotaan.
5. Pengawasan pelaksanaan Syirkah oleh Pengawas koperasi.
6. Semua Anggota Koperasi berhak memindahkan dan atau mewariskan Aset Syirkah sebesar porsi Modal Harta dengan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 9 KESEPAKATAN NISBAH

Nisbah bagi hasil dan bagi rugi dihitung secara proporsional yang detailnya dengan SOP tentang Keanggotaan.



ASET SYIRKAH

1. Pengakuan nilai Aset Syirkah dihitung berdasar nilai pasar, bukan berdasar nilai buku.
2. Kepemilikan Aset Syirkah Para Pihak dihitung berdasar porsi Modal Harta sebagaimana tertuang dalam pasal Penyertaan Modal.
3. Pada saat Syirkah berakhir seluruh aset dihitung dan dinilai dalam bentuk uang, Aset Syirkah sebesar Modal Harta dibagi berdasar porsi Modal Harta, sisanya dibagi sebagai bentuk keuntungan sesuai dengan pasal Kesepakatan Nisbah.

Pasal 11 BIAYA - BIAYA

Biaya terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, misalnya:

- a. Biaya langsung seperti operasional, kerugian proyek, pajak dll;
- b. Biaya tidak langsung seperti sewa kantor, penyusutan, listrik dll.

Pasal 12 KEJADIAN KAHAR

1. Kejadian Kahr adalah situasi luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah yang mengakibatkan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya.
2. Jika terjadi Kejadian Kahr maka Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua terlepas dari tanggung jawab masing-masing.

Pasal 13 KORESPONDENSI

Para Pihak menggunakan identitas dibagian awal Akad ini untuk korespondensi, setiap perubahan maka wajib di sampaikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 14 PERUBAHAN AKAD

Perubahan sebagian atau keseluruhan terkait isi yang diatur dalam musyawarah yang disebut RAT.

Pasal 15 PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan Akad ini apabila terjadi permasalahan maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada ketentuan syariah, apabila tidak terjadi mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di pengadilan syariah hukum tempat ditanda tangani nya Akad atau pengadilan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 16 LAIN - LAIN



Apabila ada hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Akad, Para Pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum atau dokumen tertulis lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. Ketentuan perubahan dan perbaikan di dalam akad dan addendum harus dilaksanakan berdasarkan hukum syar'i yang tidak mengandung unsur riba, ghoror dan dzalim.

Pasal 17
PENUTUP

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai asli.

PIHAK PERTAMA

stempel

Pengurus

PIHAK KEDUA

materai disini

Saksi-saksi

1.

(sebutkan Alamat/KTP/UMUR)

2.

(sebutkan Alamat/KTP/UMUR)

****Lampirkan Fotocopy KTP, Badge dan NPWP***

KUASA PENDAFTARAN

(untuk penambahan rekening terdaftar di Mandiri Cash Management)



Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama _____
 Nomor Identitas (KTP/Paspor *) _____
 NPWP _____
 Alamat _____
 No Telepon _____
 Rumah _____
 Kantor _____
 Selular _____

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **) :

☐ diri sendiri;
☐ Perusahaan _____
 yang beralamat _____
 dalam kedudukannya selaku _____
 dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama perusahaan _____
 0 _____

selaku Pemegang Rekening Giro/Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Bank Mandiri") sebagai berikut ("Rekening Bank") :

No.	Rekening	Cabang Pengelola Rekening
1		
2		

Yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

II Nama Perusahaan _____ : Koperasi Karyawan Minyak Caltex
 NPWP _____ : 01.230.693.2.218.000
 Alamat _____ : Komp Angsana 701-707 PT CPI Rumbai Pekanbaru
 Diwakili oleh _____ :
 Nama _____ :
 Nomor Identitas (KTP/Paspor*) _____ :
 Jabatan _____ :
 _____ :

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas : Koperasi Karyawan Minyak Caltex selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menyepakati dan menyetujui sebagai berikut :

1 Pihak Pertama setuju untuk mendaftarkan dan memberikan akses atas Rekening Bank untuk disertakan dalam jaringan Mandiri Cash Management (MCM) Bank Mandiri atas nama Pihak Kedua.

2 Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk melakukan ***) :

☐ pengecekan (inquiry) saldo dan transaksi;
☐ penarikan dan penyimpanan data transaksi
☐ penempatan dan/atau pengkreditan atas rekening Bank
 untuk setiap nilai transaksi yang dari waktu ke waktu akan dilakukan oleh Pihak Kedua. Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan persetujuan kepada Bank Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak.

3 Kuasa ini dilaksanakan dengan mengindahkan hal-hal sbb :

a. Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakhirnya kuasa-kuasa tersebut berlaku sejak dicabutnya kuasa secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta pencabutan tersebut telah diterima secara tertulis oleh Bank Mandiri.

b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini berikut segala akibatnya.

c. Bahwa atas pemberian dan pelaksanaan kuasa diatas, Para Pihak membebaskan Bank Mandiri dari segala kerugian dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua sendiri, termasuk tapi tidak terbatas pada masalah dalam penempatan, pengkreditan dan pendataan. Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Para Pihak atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan efektif berlaku sejak tanggal surat ini.

Pihak Kedua _____ Pihak Pertama _____
 (tanda tangan & cap perusahaan) (tanda tangan dan cap perusahaan)

Cab Pengelola Rekening _____
 (tanda tangan dan stempel)

Nama & Badge

* Agar dilakukan verifikasi sesuai identitas, buku tabungan/rekening giro dan kartu ATM.
 ** Pilih salah satu sesuai dengan status Pihak Pertama.
 *** Beri tick mark pada fitur yang dibutuhkan.



KOPERASI SYARIAH SETIA AMANAH SEJAHTERA

KOMPLEKS ANGSA NO.701 – 708 RUMBAI CAMP PT.PHR PEKANBARU 28263, INDONESIA

BADAN HUKUM
AHU-0000907.AH.01.26 TAHUN 2019
TGL. 06 DESEMBER 2019

TELP. (0761) 946935 , Email : kkmcc.unitsyariah@gmail.com

BANKIR:
BANK SYARIAH INDONESIA

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI

KEPADA : TEAM HUMAN CAPITAL – PT

DARI : NAMA :

NO PEGAWAI :

FUNGSI :

ALAMAT :

EMAIL :

NO HP :

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT.untuk memotong gaji saya dan mengirimkannya kepada Koperasi Syariah Setia Amanah Sejahtera (KSSAS) untuk jumlah sebagai berikut:

No	Total Jumlah Pemotongan	Lama Pemotongan	Jumlah Potongan/Bulan	Mulai Berlaku

Selanjutnya saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat kuasa pemotongan gaji ini tidak dapat dibatalkan/dicabut sampai pembayaran kewajiban saya di atas lunas sepenuhnya.
2. Saya juga memberikan kuasa kepada PT.....untuk memberikan data keuangan saya kepada Koperasi Syariah Setia Amanah (KSSAS) sepanjang dibutuhkan sehubungan dengan pemberian kuasa ini.
3. Gaji saya yang telah dipotong harap dikirimkan kepada KSSAS melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekanbaru dengan nomor rekening 5555.1111.44 atas nama Kopsya Setia Amanah Sejahtera.
4. Saya tidak akan mengajukan tuntutan apapun baik pidana maupun perdata kepada PT. ... beserta afiliasinya dan para pegawainya, serta akan membela dan melindungi dari tuntutan hukum pihak ketiga manapun sehubungan dengan pemberian kuasa ini.

Demikian surat kuasa pemotongan gaji ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rumbai,
Yang memberi kuasa,

(.....)